

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sustainable Development Goals (SDGs) yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disepakati oleh seluruh negara anggotanya pada tahun 2015 melalui Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan merupakan kerangka kerja global yang menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan perdamaian, kesejahteraan manusia, dan keberlanjutan planet, baik pada masa kini maupun masa depan. Agenda ini berfokus pada 17 tujuan yang menjadi seruan bagi seluruh negara, baik negara maju maupun berkembang, untuk mengambil tindakan melalui kemitraan global. Tujuan-tujuan tersebut menegaskan bahwa upaya mengakhiri kemiskinan dan berbagai bentuk keterbatasan lainnya perlu dilakukan sejalan dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, pengurangan ketimpangan, serta pendorongan pertumbuhan ekonomi, yang disertai dengan upaya penanganan perubahan iklim dan pelestarian ekosistem laut serta hutan (UN DESA, 2025).

Tujuan dalam SDGs yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi adalah tujuan ke-8, yaitu *Decent Work and Economic Growth* atau Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini berfokus pada upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung tersedianya lapangan kerja yang penuh,

produktif, dan layak bagi seluruh masyarakat (Paksi dkk., 2024). Sektor bisnis yang memegang peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus turut berperan aktif guna mencapai tujuan-tujuan tersebut (Sutrisno dkk., 2023).

Salah satu sektor bisnis yang sangat penting dalam mewujudkan SDGs nomor 8 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Giovanni dkk., 2023). UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PDB telah meningkat, lapangan kerja telah tercipta, dan pendapatan masyarakat telah didistribusikan secara adil berkat kontribusi tersebut (Syaputri dkk., 2026).

UMKM di Indonesia merupakan salah satu sektor usaha dengan jumlah unit usaha yang besar dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2025) melaporkan bahwa terdapat lebih dari 64 juta UMKM. UMKM juga menyerap sekitar 97% angkatan kerja dan menyumbang lebih dari 60% PDB.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki konsentrasi UMKM yang tinggi adalah DKI Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terdapat 1,1 juta UMKM di wilayah tersebut, yang mencakup 98,78% dari seluruh unit usaha. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian dengan berbagai peluang usaha yang menjanjikan. Selain itu, UMKM di DKI Jakarta cenderung lebih berkembang dibandingkan dengan

daerah lain di Indonesia (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, 2024).

Kelurahan Kuningan Barat merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Wilayah ini memiliki aktivitas perekonomian dan perkembangan UMKM yang cukup tinggi karena didukung oleh letaknya yang strategis, sehingga mendorong tumbuhnya berbagai jenis usaha. Selain itu, kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi yang diminati pelaku UMKM karena mudah dijangkau dan berada di dekat kawasan perkantoran serta pusat aktivitas masyarakat. Keberadaan UMKM di wilayah ini turut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui penyediaan sumber pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar (Singawinata & Saifulloh, 2021).

Perkembangan UMKM menunjukkan pentingnya pembinaan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas usaha. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan tersebut juga penting untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Akibun dkk., 2024).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program pendampingan dan pemberdayaan yang disebut Jakpreneur (*Jakarta*

Entrepreneur) untuk membantu UMKM berkembang. Dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan usaha, para pelaku UMKM yang mengikuti program Jakpreneur mendapatkan pelatihan di bidang pelaporan keuangan. Selain memfasilitasi akses UMKM terhadap pendanaan, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, yang berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan bisnis (Katya & Saraswati, 2021).

Bagi UMKM, laporan keuangan yang disusun dengan baik sangatlah penting karena memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai kondisi keuangan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai serangkaian pedoman yang lebih sederhana dan bermanfaat untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan. Pedoman ini menggunakan biaya historis sebagai dasar penilaian dan sangat menekankan pemisahan aset pribadi pemilik dari aset usaha (Susilawati dkk., 2025). Dengan menerapkan SAK EMKM, UMKM dapat meningkatkan kualitas laporannya, mempermudah mereka dalam memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan, serta mendorong keberlanjutan usaha mereka (Larasati & Lestari, 2025).

Salah satu kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM adalah kurangnya pemahaman di bidang akuntansi (Nurhikmawani dkk., 2026). Kemampuan untuk

mengenali dan memahami akuntansi dikenal sebagai pemahaman akuntansi. Kemampuan untuk mendokumentasikan aktivitas keuangan, mengelompokkan dan merangkumnya, menyusun laporan keuangan, serta menganalisis data keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dapat digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman akuntansi seseorang (Setiajatnika & Dewi, 2022). Pelaku UMKM dengan tingkat pemahaman akuntansi yang rendah akan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat menghambat evaluasi dan perencanaan keuangan, pengambilan keputusan usaha, pengelolaan arus kas, serta akses pembiayaan dari pihak eksterna (Rahma dkk., 2025).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurohmah (2023), Zahroh & Rosdiana (2024), Ningsih dkk. (2025), dan Amanda dkk. (2025), pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan meningkat seiring dengan tingkat pemahaman akuntansi yang mereka miliki. Pelaku UMKM dapat menyusun laporan keuangan secara akurat, sistematis, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku jika mereka memiliki pemahaman yang memadai. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Manalu dkk. (2023), Parmawati dkk. (2024), Patmawati dkk. (2024), dan Purwanto & Wuryandari (2024), yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM

berdasarkan SAK EMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pelaku UMKM tidak selalu menjamin bahwa mereka dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar akuntansi.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi cara penyusunan laporan keuangan UMKM sesuai dengan SAK EMKM adalah ukuran usaha (Feriyanto & Nuryani, 2024). Jumlah karyawan, total pendapatan tahunan, dan total aset yang tidak termasuk tanah dan bangunan digunakan untuk menghitung ukuran usaha. Usaha-usaha dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan klasifikasinya, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar (Rahmadiani dkk., 2024). Semakin besar ukuran usaha, semakin tinggi tuntutan terhadap penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, usaha dengan ukuran yang lebih kecil juga perlu melakukan pengelolaan keuangan secara optimal untuk mendukung perkembangan usaha, meskipun memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (Andari dkk., 2025).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andari dkk. (2022), Manan & Rahmadhani (2024), Notoatmojo dkk. (2024), dan Pramudita & Firdarini (2025), ukuran usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Tuntutan pelaku usaha akan laporan keuangan untuk menilai kinerja usahanya meningkat seiring dengan pertumbuhan usaha. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM juga dapat didorong oleh meningkatnya tuntutan tersebut. Temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Aresteria & Apip (2023), Ahmad & Yandari (2024), Wijayanti & Wulandari (2024), dan Puspitasari dkk. (2026), yang menunjukkan bahwa ukuran usaha memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Kemampuan pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM tidak dapat dijamin, terlepas dari ukuran usahanya.

Salah satu faktor yang dapat mendorong pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM adalah jenjang pendidikan (Nuraeni dkk., 2026). Tahap pendidikan yang ditempuh seseorang selama proses pembelajaran jangka panjang untuk mengembangkan bakatnya dalam profesi yang dipilihnya disebut sebagai jenjang pendidikan (Santi dkk., 2022). Jenjang pendidikan pelaku UMKM merupakan faktor moderasi yang memengaruhi pemahaman mereka tentang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Prosedur penyusunan laporan keuangan mungkin tidak berjalan secara optimal jika pelaku UMKM memiliki tingkat pemahaman yang rendah (Nurhidayah dkk., 2024). Penyusunan laporan keuangan bagi UMKM dipengaruhi oleh ukuran usaha, dengan jenjang pendidikan berperan sebagai variabel moderasi. Ukuran usaha yang lebih besar mendorong pelaku UMKM untuk lebih memahami pentingnya laporan keuangan, meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir dan belajar mengelola usaha mereka, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai transaksi (Rahmadani dkk., 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh N. J. Putri & Carolina (2023), Periska dkk. (2024), dan Pradewi dkk. (2026), pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM dimoderasi oleh jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep akuntansi secara lebih efektif saat menyusun laporan keuangan. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meidawati dkk. (2024), Nainggolan dkk. (2025), dan Faiz & Zulkifli (2026), yang menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM tidak dimoderasi oleh jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh adanya pelaku usaha yang memiliki motivasi tinggi untuk mempelajari dan memahami proses akuntansi serta pelaporan keuangan, sehingga jenjang pendidikan yang rendah tidak menghalangi pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Sani (2024), Naibaho dkk. (2024), dan Notoatmojo dkk. (2024), pengaruh ukuran usaha terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM dimoderasi oleh jenjang pendidikan. Pelaku UMKM akan lebih cenderung memahami pelaporan keuangan dan mencari cara untuk mengatasi masalah keuangan usaha jika ukuran usahanya lebih besar. Temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarso & Yuniarto (2023), P. Putri & Merliana (2024), dan Nata dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa

pengaruh ukuran usaha terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM tidak dimoderasi oleh jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha tetap terdorong untuk melakukan pencatatan keuangan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka, sehingga rendahnya jenjang pendidikan tidak memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan di berbagai ukuran usaha.

Berbagai temuan penelitian memiliki hasil yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan gap penelitian yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan jenjang pendidikan sebagai variabel moderasi, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman akuntansi dan ukuran usaha terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ukuran Usaha terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM dengan Jenjang Pendidikan sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian telah mengkaji pengaruh pemahaman akuntansi dan ukuran usaha terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Namun, hingga saat ini masih terdapat perbedaan dalam hasil penelitian. Pengujian terhadap jenjang pendidikan, baik yang dianggap sebagai variabel moderasi maupun tidak, juga menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini sesuai dengan gap penelitian tersebut:

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
2. Apakah ukuran usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
3. Apakah jenjang pendidikan memoderasi pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
4. Apakah jenjang pendidikan memoderasi pengaruh ukuran usaha terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang disebutkan di atas menjadi dasar bagi tujuan penelitian berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran usaha terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
3. Untuk mengetahui peran jenjang pendidikan dalam memoderasi pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
4. Untuk mengetahui peran jenjang pendidikan dalam memoderasi pengaruh ukuran usaha terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca dan peneliti mengenai cara menyusun laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM serta menambah literatur atau menjadi referensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Sebagai data pelengkap dan sumber untuk penelitian selanjutnya, terutama terkait faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

b. Bagi UMKM

Dengan menyoroti pentingnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, hasil penelitian ini dapat membantu UMKM mengatasi masalah yang memengaruhi kondisi keuangan usaha mereka.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum, terutama terkait faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

Intelligentia - Dignitas